



Salinan

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  6. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
7. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

#### Pasal 2

Klasifikasi Arsip di Lingkungan BSN merupakan acuan bagi unit kerja dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.

#### Pasal 3

Penyusunan Klasifikasi Arsip harus sesuai dengan ketentuan teknis:

- a. logis;
- b. faktual;
- c. perbaikan berkelanjutan;
- d. sistematis;
- e. akomodatif; dan
- f. kronologis.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan BSN menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip dibedakan sesuai fungsinya menjadi:
  - a. Fungsi Fasilitatif; dan
  - b. Fungsi Substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan kesekretariatan.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1084

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

  
Iryana Margahayu

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

1. Ruang lingkup

Lampiran Peraturan Badan ini memberikan pengaturan mengenai pemberian kode pada arsip untuk melaksanakan pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

A. FUNGSI FASILITATIF

KU. KEUANGAN

00. Pelaksanaan Anggaran

00.00 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Naskah yang berkaitan dengan pengajuan Formulir Pembiayaan Kegiatan/RAB.

00.01 Penggajian

Naskah yang berkaitan dengan penggajian pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.

00.02 Pengeluaran Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran keluaran, baik yang berupa Petunjuk Pelaksanaan/Mekanisme Pengelolaan APBN sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

01. Pengelolaan Perbendaharaan

01.00 Perbendaharaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti SK Pengangkatan KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran.

01.01 Kartu Pengawasan Kredit

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Kartu Pengawasan Kredit Anggaran.

01.02 Pajak

Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan pembayaran pajak.

01.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa Penerimaan Non Pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sampai pengaturan pencairan dana PNBP melalui Maksimum Pencairan Dana (MP).

01.04 Pengembalian Belanja

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan pengembalian belanja yang melampaui tahun anggaran berjalan melalui SSBP.

01.05 Berita Acara Pemeriksaan Kas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kas.

01.06 Tuntutan Ganti Rugi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Tuntutan Ganti Rugi.

01.07 Pembukuan Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan.

02. Verifikasi Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.

03. Akuntansi dan Pelaporan

Naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran dan pelaporan berupa Laporan Keuangan, LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

04. Ketatausahaan Keuangan

04.00 Keterangan Penghasilan

Naskah yang berkaitan dengan keterangan penghasilan.

04.01 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan SKPP.

04.02 Permohonan Pinjaman

Naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan berupa permohonan pinjaman.

04.03 Iuran Keanggotaan Organisasi

Naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi, baik tingkat nasional maupun internasional, mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai pelaporan.

## KA. PERSURATAN DAN KEARSIPAN

### 00. Administrasi Persuratan

#### 00.00 Buku Agenda

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengelolaan surat dengan menggunakan buku agenda.

#### 00.01 Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi/ Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip

Naskah yang berkaitan Lembar Pengantar/ Buku Ekspedisi/Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip.

#### 00.02 Pengurusan Surat Masuk

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.

#### 00.03 Pengurusan Surat Keluar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.

### 01. Pengelolaan Arsip Dinamis

#### 01.00 Penyusunan Sistem

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi petunjuk pelaksana dan JRA.

#### 01.01 Pembinaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis/workshop/sosialisasi.

01.02 Monitoring

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit-unit kerja.

02. Pengelolaan Arsip Inaktif

02.00 Penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.

02.01 Peminjaman Arsip

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip *inaktif* di *record center*.

03. Penyusutan Arsip

03.00 Pemindahan Arsip Inaktif

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan.

03.01 Pemusnahan Arsip

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip.

03.02 Penyerahan Arsip Statis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis.

04. Evaluasi Sistem Kearsipan

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem kearsipan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan evaluasi sistem kearsipan.

PL. PERLENGKAPAN

00. Perencanaan pengadaan barang dan jasa

00.00 Analisis Kebutuhan

Naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.

00.01 Tata Ruang

Naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.

00.02 Sosialisasi/ *Workshop*/Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/*workshop*/bimtek tentang pengadaan barang dan jasa.

01. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

01.00 Alat Tulis Kantor (ATK)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ATK dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.01 Perlengkapan Kantor

Naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti komputer, laptop, meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.02 Tanah dan Bangunan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.03 Kendaraan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKB, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.04 Instalasi/Jaringan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, *Local Area Network* (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.05 Jasa Profesi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tenaga ahli/tenaga profesi dari proses awal pengadaan sampai Berita Acara Serah Terima.

01.06 Sewa Rumah/Kendaraan/Gudang Operasional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Sewa Rumah/Kendaraan/Gudang Operasional dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.07 Jasa Akomodasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa akomodasi seperti penggunaan/pemakaian hotel dari proses awal pengadaan sampai Berita Acara Serah Terima.

01.08 Jasa Lainnya

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya dari proses awal pengadaan sampai Berita Acara Serah Terima.

01.09 Jasa Konsultan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa konsultan dari proses awal pengadaan sampai Berita Acara Serah Terima.

02. Penyimpanan Barang dan Distribusi

02.00 Penyimpanan inventaris kekayaan negara

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan inventaris kekayaan negara untuk kepentingan intern maupun ekstern seperti surat bukti barang masuk, surat bukti pengeluaran barang.

02.01 Pendistribusian

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang.

03. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

03.00 Pembukuan BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan BMN seperti Daftar Barang Kuasa/ pengguna, kartu identitas barang.

03.01 Daftar Barang Ruangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses identifikasi daftar barang yang ada di lingkungan BSN.

03.02 Inventarisasi BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN di lingkungan BSN, termasuk perencanaan sampai laporan hasil inventarisasi.

03.03 Penghapusan BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk Berita Acaranya.

03.04 Pelaporan BMN

Naskah yang berkaitan dengan pelaporan barang milik negara.

03.05 Sertifikasi BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan barang milik negara.

04. Pemeliharaan/Perawatan BMN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan *server/hosting*, perbaikan kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.

RT. KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA

00. Fasilitas

00.00 Fasilitas Kendaraan Dinas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir

permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan.

00.01 Fasilitas Ruang Rapat

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat.

00.02 Pemakaian Telepon, Internet, Listrik, Air

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana Telepon, Internet, Listrik, Air.

00.03 Administrasi Pemeliharaan Gedung dan Taman

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses administrasi pemeliharaan gedung dan taman.

00.04 Administrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi perbaikan, instalasi dan pengawasan instalasi.

00.05 Administrasi Pengadaan Alih Daya

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengadaan Alih Daya.

01. Perjalanan Dinas

01.00 Perjalanan dinas luar negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan *passport* dan visa.

01.01 Perjalanan dinas dalam negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri termasuk pengurusan berkas dan tiket pesawat.

02. Ketertiban dan keamanan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan, penjagaan serta pemantauan dan pelaporan ketertiban dan keamanan seperti kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas.

03. Sosialisasi/Bimtek/*Workshop* Layanan Rumah Tangga  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/  
bimtek/*workshop* tentang layanan rumah tangga.

PR. PERENCANAAN

00. Kebijakan dan Strategi Pembangunan

00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP.

00.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan RPJM.

00.02 Rencana Strategis (Renstra)

Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Renstra BSN. Terdiri dari berkas penyusunan renstra, dokumen renstra.

00.03 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan RKP BSN. Terdiri dari berkas penyusunan rencana kerja pemerintah.

01. Rencana Kerja

01.00 Usulan Perencanaan Kegiatan

Naskah yang berhubungan dengan usulan unit kerja, termasuk KAK/RAB.

01.01 Rencana Kinerja Tahunan

Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

01.02 Rencana Kerja

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja.

02. Penetapan Kinerja

Naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Pejabat Administrator dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Kepala BSN.

03. Perencanaan Anggaran

03.00 Penyusunan Rencana Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran termasuk seluruh dokumen penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Pagu Anggaran, penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran, DIPA Murni dan POK Awal.

03.01 Standar Biaya Keluaran (SBK)

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan SBK.

04. Revisi Dokumen Anggaran

04.00 Revisi DIPA dan POK

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran, baik revisi anggaran yang merupakan kewenangan Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran, maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

04.01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya APBN-P.

05. Penyusunan Laporan

05.00 Laporan Berkala

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan) BSN.

05.01 Laporan Khusus

Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: Pidato Presiden, Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI.

05.02 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.

06. Evaluasi

Evaluasi Program dan Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program dan anggaran.

HK. HUKUM

00. Program Legislasi

00.00 Program Legislasi Nasional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi nasional.

00.01 Program Legislasi BSN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi BSN.

01. Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

01.00 Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mulai dari penyusunan naskah akademik, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

01.01 Rancangan Peraturan Pemerintah

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

mulai dari penyusunan naskah urgensi, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

01.02 Rancangan Peraturan Presiden

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden termasuk penyusunan naskah urgensi, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

01.03 Rancangan Peraturan Menteri atau Rancangan Peraturan Lembaga Lain

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan lembaga lain.

01.04 Rancangan Peraturan BSN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Peraturan BSN termasuk penyusunan naskah urgensi, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan monitoring dan evaluasi.

02. Instrumen Hukum

02.00 Keputusan Presiden

Naskah yang berkaitan dengan keputusan presiden namun tidak termasuk yang dikecualikan antara lain naskah yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.

02.01 Keputusan Kepala BSN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan keputusan mulai dari rancangan, penelaahan sampai dengan ditetapkan Keputusan Kepala BSN.

02.02 Instruksi/Surat Edaran Presiden

Naskah yang berkaitan dengan instruksi/surat edaran presiden.

02.03 Instruksi/Surat Edaran Menteri atau Lembaga Lain  
Naskah yang berkaitan dengan naskah instruksi/surat edaran menteri atau lembaga lain.

02.04 Instruksi/Surat Edaran Kepala BSN  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Instruksi/Surat Edaran mulai dari rancangan, penelaahan sampai dengan penetapan.

03. Dokumentasi dan Informasi Hukum

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

04. Kasus/Sengketa Hukum

01.00 Pidana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses tentang kasus/sengketa pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, analisa hukum, pendapat hukum, dan bantuan hukum sampai dengan putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

01.01 Perdata

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses tentang kasus/sengketa perdata, mulai dari analisa hukum, pendapat hukum, dan bantuan hukum sampai dengan putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan eksekusi putusan majelis hakim.

01.02 Tata Usaha Negara

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara, mulai dari analisa hukum, pendapat hukum, dan bantuan hukum sampai dengan putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan eksekusi putusan majelis hakim.

01.03 Yudisial Review

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan yudisial review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

01.04 Arbitrase

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

01.05 Badan Penyelesaian Sengketa lain

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian sengketa di badan penyelesaian sengketa lain.

05. Analisa dan Pengkajian Hukum

05.00 Analisa dan Pengkajian Hukum

Naskah yang berkaitan dengan analisa dan pengkajian peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum baik nasional dan internasional.

05.01 Analisa dan Pengkajian Rancangan Kerja Sama

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan pengkajian terhadap rancangan kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian baik nasional dan internasional.

06. Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ *workshop*/ sosialisasi/ penyuluhan hukum dan penyebaran peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum.

OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

00. Organisasi

00.00 Peraturan Perundang-undangan

Naskah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi dan tata laksana.

00.01 Analisis dan Evaluasi Organisasi

Naskah yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi organisasi.

01. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

01.00 Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja

Naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

01.01 Peta Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan peta jabatan.

02. Standar Kompetensi

02.00 Standar Kompetensi Teknis

Naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi teknis.

02.01 Standar Kompetensi Manajerial

Naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi manajerial.

02.02 Standar Kompetensi Sosial Kultural

Naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi sosial kultural.

03. Evaluasi Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan BSN.

04. Tata Laksana

04.00 Proses Bisnis

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan, penyelarasan, dan evaluasi proses bisnis.

04.01 Sistem Manajemen Mutu

Naskah yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

05. Reformasi Birokrasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan BSN.

KP. KEPEGAWAIAN

00. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai

00.00 *Bezetting* /Persediaan Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan *bezetting* /persediaan pegawai.

00.01 Formasi Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan usulan, persetujuan, dan penetapan formasi.

01. Pengadaan Pegawai

01.00 Penerimaan

Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, seleksi sampai dengan pengumuman penerimaan.

01.01 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.

01.02 Prajabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan.

02. Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan

02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS.

- 02.01 Ujian Dinas  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS.

03. *Assessment*/Ujian Kompetensi

- 03.00 *Assessment* Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan *Assessment* Pegawai.
- 03.01 Pemetaan/*Talent Mapping* Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/ *talent mapping* pegawai.

04. Mutasi

- 04.00 Kenaikan Pangkat/Golongan  
Naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan pegawai.
- 04.01 Kenaikan Gaji Berkala  
Naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai.
- 04.02 Penyesuaian Tunjangan Keluarga  
Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
- 04.03 Penyesuaian Kelas Jabatan  
Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan perubahan jabatan pegawai.
- 04.04 Rotasi Kerja  
Naskah yang berkaitan dengan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.
- 04.05 Mutasi Keluarga  
Naskah yang berkaitan dengan proses mutasi data keluarga termasuk pernikahan/perceraian, kelahiran anak, adopsi anak, meninggal dunia pegawai.
- 04.06 Alih Tugas  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi.

05. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

05.00 Pengangkatan Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi termasuk di dalamnya pelantikan.

05.01 Pemberhentian Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.

06. Pendelegasian Wewenang

06.00 Pelaksana Tugas (Plt)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitif yang berhalangan tetap.

06.01 Pelaksana Harian (Plh)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif berhalangan sementara misalnya tugas luar, cuti, mengikuti pendidikan dan pelatihan.

07. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

07.00 Program Diploma

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program Diploma.

07.01 Program Sarjana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program Sarjana.

07.02 Program Pasca Sarjana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan, dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana.

07.03 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

Naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi diklat penjenjangan pegawai dari tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan Pejabat Pengawas.

07.04 Kursus/Diklat Fungsional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat fungsional.

07.05 Kursus/Diklat Teknis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat teknis.

07.06 Orientasi CPNS/CASN

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan orientasi CPNS/CASN seperti pembekalan CPNS/CASN dan program magang CPNS/CASN di unit kerja.

08. Penilaian Kinerja, Disiplin, Kode Etik

08.00 Penilaian Prestasi Kerja

Naskah yang berkaitan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penilaian Perilaku, Penilaian Prestasi Kerja.

08.01 Penilaian Kinerja

Naskah yang berkaitan dengan tim penilaian kinerja dan hasil penilaian kinerja.

08.02 Data Presensi

Naskah yang berkaitan dengan data presensi untuk pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan pegawai.

08.03 Disiplin Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan proses penegakan disiplin.

08.04 Kode Etik Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan kode etik.

#### 09. Administrasi Pegawai

09.00 Keterangan Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pegawai.

09.01 Kartu Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.

09.02 Karis/Karsu  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).

09.03 Kartu Taspen  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.

09.04 Kartu Jaminan Kesehatan  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang kartu jaminan kesehatan.

09.05 Tanda Jasa  
Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai.

09.06 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan KP4.

09.07 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan LHKPN.

#### 10. Cuti Pegawai

10.00 Cuti Tahunan  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti tahunan.

- 10.01 Cuti Besar  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti besar.
  - 10.02 Cuti Sakit  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti sakit.
  - 10.03 Cuti Melahirkan  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti melahirkan.
  - 10.04 Cuti Karena Alasan Penting  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti karena alasan penting.
  - 10.05 Cuti Bersama  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti bersama.
  - 10.06 Cuti Di Luar Tanggungan Negara  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti di luar tanggungan negara.
11. Pembinaan Jabatan Fungsional
- 11.00 Pengangkatan Jabatan Fungsional  
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional.
  - 11.01 Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional  
Naskah yang berkaitan dengan jenjang jabatan dan alih jabatan.
  - 11.02 Pemindahan Jabatan Fungsional  
Naskah yang berkaitan dengan pemindahan jabatan fungsional.
  - 11.03 Pemeliharaan Angka Kredit  
Naskah yang berkaitan dengan pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
  - 11.04 Pemberhentian  
Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian jabatan fungsional termasuk di dalamnya pemberhentian sementara.

## 12. Kesejahteraan

### 12.00 Kesehatan

Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti *medical check-up* pegawai dan CPNS, serta kegiatan peningkatan wawasan kesehatan jasmani dan rohani.

### 12.01 Rekreasi/Kesenian/Olahraga

Naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian dan olah raga.

### 12.02 Bantuan Sosial

Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.

### 12.03 Tabungan Perumahan

Naskah yang berkaitan dengan tabungan perumahan bagi pegawai.

### 12.04 Pakaian Dinas

Naskah yang berkaitan dengan pakaian dinas pegawai.

## 13. Pemberhentian Pegawai

### 13.00 Dengan Hormat

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan pensiun termasuk di dalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.

### 13.01 Tidak Dengan Hormat

Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian.

14. Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda/PNS yang Tewas

Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/Janda/Duda/PNS yang tewas.

15. Organisasi Non Kedinasan

15.00 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI BSN.

15.01 Dharma Wanita

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita BSN.

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT

00. Peliputan dan Publikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang standardisasi dan non standardisasi melalui kegiatan peliputan dan publikasi melalui, wawancara, konferensi pers, *press realease*, media masa (Televisi, Radio, Surat Kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik.

01. Dengar Pendapat/*Hearing* DPR-RI

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/*hearing* dengan DPR.

02. Hubungan Antar Lembaga

02.00 Lembaga Negara

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.

02.01 Organisasi Standardisasi Nasional dan Internasional

Naskah yang berkaitan dengan organisasi-organisasi standardisasi.

02.02 Perusahaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta).

02.03 Organisasi Kemasyarakatan dan Asosiasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan dan asosiasi.

02.04 Perguruan Tinggi/Sekolah

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/sekolah.

02.05 Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan Bakohumas.

02.06 Media Massa

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan media massa.

03. Keprotokolan

03.00 Upacara/Acara Kedinasan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara bukan upacara bendera, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan dan acara kedinasan lainnya.

03.01 Kunjungan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.

03.02 Agenda Pimpinan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadualan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.

04. Dokumentasi dan Penerbitan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan *shooting*) dan penerbitan

buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.

05. Pameran/Sayembara/Lomba

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pameran/Sayembara/Lomba mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

06. Tanda Kenang-kenangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa prestasi atau kontribusi/perhatian di bidang standardisasi.

PW. PENGAWASAN

00 Rencana Pengawasan

00.00 Rencana Strategi Pengawasan

Naskah yang berkaitan dengan rencana strategi pengawasan.

00.01 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional.

01 Pelaksanaan Pengawasan

01.00 Pengawasan Audit Yang Memerlukan Tindak Lanjut

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit yang memerlukan tindak lanjut.

01.01 Pengawasan Audit Yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit yang tidak memerlukan tindak lanjut.

01.02 Pengawasan Audit Investigasi Yang Memerlukan Tindak Lanjut

Naskah yang berkaitan dengan pengawasan audit investigasi yang memerlukan tindak lanjut.

01.03 Pengawasan Audit Investigasi Yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut

Naskah yang berkaitan dengan pengawasan audit investigasi yang tidak memerlukan tindak lanjut.

01.04 Pengaduan Masyarakat

Naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat baik yang datang dari internal maupun eksternal BSN.

01.05 Tindak lanjut Data Temuan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan tindak lanjut data temuan dalam pengawasan audit internal dan eksternal.

01.06 Reviu

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan penyusunan dan reviu atas dokumen RKAKL, *Term of Reference* (TOR) RAB, kinerja pelaksanaan kegiatan, rekonsiliasi BMN dan laporan keuangan baik semesteran dan tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan.

01.07 Pemantauan *Whistleblowing System* (WBS)

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan WBS.

01.08 Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan pengendalian gratifikasi.

01.09 Pemantauan Benturan Kepentingan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan benturan kepentingan.

01.10 Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan zona integritas WBK dan WBBM.

01.11 Seminar/Lokakarya

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seminar/lokakarya pengawasan.

- 01.12 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas suatu kegiatan pengawasan.

## FUNGSI SUBSTANTIF

### AS. AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI

#### 00. Akreditasi Lembaga Sistem Manajemen

- 00.00 Layanan Jasa Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

- 00.01 Kerjasama Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

- 00.02 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

- 00.03 Pelatihan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

- 00.04 Koordinasi/*Focus Group Discussion* (FGD)/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar

Pengembangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

01. Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan

01.00 Layanan Jasa Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan

Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi sistem manajemen lingkungan.

01.01 Kerjasama Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi sistem manajemen lingkungan.

01.02 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi akreditasi sistem manajemen lingkungan.

01.03 Pelatihan Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan akreditasi sistem manajemen lingkungan.

01.04 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar

Pengembangan Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi sistem manajemen lingkungan.

02. Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel

02.00 Layanan Jasa Produk, Pelatihan dan Personel

Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi produk, pelatihan dan personel.

02.01 Kerjasama Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi produk, pelatihan dan personel.

- 02.02 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi akreditasi produk, pelatihan dan personel.
- 02.03 Pelatihan Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan akreditasi produk, pelatihan dan personel.
- 02.04 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar Pengembangan Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi produk, pelatihan dan personel.

#### AL. AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI

##### 00. Akreditasi Laboratorium Penguji

- 00.00 Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium Penguji  
Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi laboratorium penguji.
- 00.01 Kerjasama Akreditasi Laboratorium Penguji  
Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi laboratorium penguji.
- 00.02 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Penguji  
Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi akreditasi laboratorium penguji.
- 00.03 Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium Penguji  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis akreditasi laboratorium penguji.
- 00.04 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar Akreditasi Laboratorium Penguji  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar akreditasi laboratorium penguji.

- 00.05 Pelaksanaan Uji Profisiensi Laboratorium  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan uji profisiensi laboratorium.
- 00.06 Bimbingan Teknis Uji Profisiensi Laboratorium  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis uji profisiensi laboratorium.
- 00.07 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar Pengembangan Uji Profisiensi Laboratorium  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan uji profisiensi laboratorium.

#### 01. Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

- 01.00 Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium Kalibrasi  
Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi laboratorium kalibrasi.
- 01.01 Kerjasama Akreditasi Laboratorium Kalibrasi  
Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi laboratorium kalibrasi.
- 01.02 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi  
Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi akreditasi laboratorium kalibrasi.
- 01.03 Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium Kalibrasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis akreditasi laboratorium kalibrasi.
- 01.04 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar Akreditasi Laboratorium Kalibrasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi laboratorium kalibrasi.
- 01.05 Monitoring Kompetensi Laboratorium Kalibrasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring kompetensi laboratorium kalibrasi.

- 01.06 Pengembangan, Pelaksanaan dan Evaluasi Ketelusuran Standar Fisik  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi uji komparasi laboratorium kalibrasi.
- 01.07 Layanan Jasa Akreditasi Penyelenggaraan Uji Profisiensi  
Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi penyelenggaraan uji profisiensi.
- 01.08 Kerjasama Akreditasi Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi  
Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi
- 01.09 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi  
Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi
- 01.10 Pengembangan kompetensi personel Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kompetensi akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi.
- 01.11 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi.  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi.
- 01.12 Layanan Jasa Akreditasi Produsen Bahan Acuan  
Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi produsen bahan acuan.
- 01.13 Kerjasama Akreditasi Produsen Bahan Acuan  
Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi produsen bahan acuan.

01.14 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Produsen Bahan Acuan

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi akreditasi produsen bahan acuan

01.15 Pengembangan kompetensi personel Akreditasi Produsen Bahan Acuan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kompetensi personel akreditasi produsen bahan acuan.

01.16 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar Akreditasi Produsen Bahan Acuan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi produsen bahan acuan.

02. Akreditasi Lembaga Inspeksi

02.00 Layanan Jasa Akreditasi Lembaga Inspeksi

Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi lembaga inspeksi.

02.01 Kerjasama Akreditasi Lembaga Inspeksi

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama akreditasi lembaga inspeksi.

02.02 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Inspeksi

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi akreditasi lembaga inspeksi.

02.03 Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Inspeksi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis akreditasi lembaga inspeksi.

02.04 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar Akreditasi Lembaga Inspeksi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi lembaga inspeksi.

02.05 Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium Medik

Naskah yang berkaitan dengan layanan jasa akreditasi laboratorium medik

02.06 Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi  
Laboratorium Medik

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi akreditasi laboratorium medik.

02.07 Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium Medik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis akreditasi laboratorium medik.

02.08 Koordinasi/FGD/Sosialisasi/*Workshop*/Seminar  
Laboratorium Medik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi/FGD/sosialisasi/*workshop*/seminar pengembangan akreditasi laboratorium medik.

LB. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

00. Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan

00.00 Pedoman Penelitian dan Pengembangan  
Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan pedoman dalam penelitian dan pengembangan standardisasi.

00.01 Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan rencana strategis dalam penelitian dan pengembangan dalam bidang standardisasi.

01. Pembinaan Program Bidang Penelitian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan pembinaan program bidang penelitian dan pengembangan standardisasi meliputi bimbingan teknis, sosialisasi/*workshop*/lokakarya/seminar/diseminasi oleh peneliti.

02. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasi meliputi hasil penelitian.

03. Kerjasama di Bidang Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi.

04. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

04.00 Pemantauan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan laporan pemantauan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi.

04.01 Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan laporan evaluasi dan pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan standardisasi.

05. Tata Operasional Penelitian

Naskah yang berkaitan dengan program, perencanaan dan penatalaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi.

06. Publikasi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan publikasi di bidang penelitian standardisasi meliputi jurnal bertaraf nasional maupun internasional, pertemuan dan presentasi ilmiah standardisasi serta kegiatan ilmiah lainnya yang dilakukan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang penelitian.

SP. SISTEM PENERAPAN STANDAR

00. Kebijakan Terkait Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan Serta Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan kebijakan terkait dengan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

## 01. Prasarana Penerapan Standar

### 01.00 Pelaksanaan Sistem Prasarana Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar.

### 01.01 Inventarisasi Prasarana Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan inventarisasi prasarana penerapan standar.

### 01.02 Identifikasi Prasarana Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan identifikasi prasarana penerapan standar.

### 01.03 Evaluasi Sistem Prasarana Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan evaluasi sistem prasarana penerapan standar.

### 01.04 Bimbingan Teknis Prasarana Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis prasarana penerapan standar.

### 01.05 Sosialisasi/ *Workshop*/FGD Prasarana Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/ *workshop*/FGD prasarana penerapan standar.

## 02. Sistem Jaminan Mutu

### 02.00 Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem jaminan mutu.

### 02.01 Inventarisasi Sistem Jaminan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan inventarisasi sistem jaminan mutu.

### 02.02 Identifikasi Sistem Jaminan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan identifikasi sistem jaminan mutu.

02.03 Evaluasi Sistem Jaminan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan evaluasi sistem jaminan mutu.

02.04 Bimbingan Teknis Sistem Jaminan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis sistem jaminan mutu.

02.05 Sosialisasi/ *Workshop*/FGD Sistem Jaminan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/ *workshop*/FGD sistem jaminan mutu.

03. Penerapan Standar Wajib

Naskah yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan monitoring program penyusunan regulasi teknis berbasis (Standar Nasional Indonesia (SNI)).

04. Penerapan Standar Sukarela

04.00 Skema Penerapan SNI

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan skema penerapan SNI.

04.01 Penggunaan Tanda SNI

Naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI.

05. Penanganan Pengaduan Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan penerapan standar.

06. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemberlakuan Standar

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar.

PS. PERUMUSAN STANDAR

00. Kebijakan Nasional Pengembangan SNI

00.00 Kelembagaan Manajemen Teknis Perumusan Standar/Komisi Kebijakan Pengembangan Standar

Naskah yang berkaitan dengan kelembagaan Manajemen Teknis Perumusan Standar (MTPS)/Komisi Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS).

- 00.01 Kebijakan Pedoman Standardisasi Nasional  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pedoman standardisasi nasional.
- 00.02 Kebijakan Ruang Lingkup Komite Teknis  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan ruang lingkup komite teknis.
- 00.03 Kebijakan Keanggotaan Komite Teknis  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan keanggotaan komite teknis.
- 00.04 Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).

#### 01. Penyelenggaraan Perumusan Standar

- 01.00 Kelembagaan Komite Teknis/SubKomite Teknis  
Naskah yang berkaitan dengan kelembagaan komite teknis meliputi sekretariat, rencana kerja, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan serta pengelolaan program pemeliharaan SNI.
- 01.01 Perumusan SNI  
Naskah yang berkaitan dengan tahapan perumusan SNI.
- 01.02 Pemeliharaan SNI  
Naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan SNI meliputi pelaksanaan dan tindak lanjut kaji ulang serta identifikasi pemeliharaan SNI.
- 01.03 Evaluasi Kinerja Komite Teknis  
Naskah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja komite teknis meliputi penyusunan kriteria evaluasi kinerja komite teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja komite teknis.

## 02. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perumus SNI

### 02.00 Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perumus Standar yaitu Sekretariat dan Anggota Komite Teknis, Editor dan Konseptor

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang meliputi Penyusunan Silabus Peningkatan Kompetensi SDM Perumus SNI yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan review serta pemutakhiran silabus.

## 03. Harmonisasi SNI

### 03.00 Partisipasi di forum pengembangan standar tingkat regional, bilateral dan internasional

Naskah yang berkaitan dengan partisipasi di forum pengembangan standar tingkat regional, bilateral dan internasional termasuk di dalamnya draft tindak lanjut pertemuan.

### 03.01 Kelembagaan *National Mirror Committee* (NMC)

Naskah yang berkaitan dengan NMC meliputi pembentukan NMC, monitoring *work programme* hingga rekomendasi untuk pengembangan SNI.

### 03.02 Tanggapan Indonesia Terhadap Draft Standar Internasional

Naskah yang berkaitan dengan pembahasan tanggapan Indonesia terhadap draft standar internasional meliputi program kerja hingga pelaksanaan penyusunan tanggapan.

## KS. KERJASAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

### 00. Kebijakan Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rumusan kebijakan di bidang kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional dan internasional.

## 01. Kerjasama Standardisasi Internasional

### 01.00 Kerjasama Multilateral

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama standardisasi tingkat multilateral.

### 01.01 Kerjasama Bilateral dan Regional

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama standardisasi tingkat bilateral dan regional.

### 01.02 Notifikasi

Naskah yang berkaitan dengan proses notifikasi Indonesia dari dan ke *World Trade Organization* (WTO).

### 01.03 *Enquiry*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan *enquiry*.

### 01.04 Pemenuhan kewajiban internasional lain

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama notifikasi internasional meliputi penyelesaian hambatan teknis di bidang perdagangan dari dalam dan luar negeri.

## 02. Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri

### 02.00 Kerjasama Standardisasi Mitra Kementerian/Lembaga

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama standardisasi mitra kementerian/lembaga.

### 02.01 Kerjasama Standardisasi Mitra Perguruan Tinggi

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama standardisasi mitra perguruan tinggi.

### 02.02 Kerjasama Standardisasi Mitra Pemerintah Daerah

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama standardisasi mitra pemerintah daerah.

### 02.03 Kerjasama Standardisasi Mitra Swasta

Naskah yang berkaitan dengan kerjasama standardisasi mitra swasta.

## 03. Implementasi Kerjasama Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan implementasi kerjasama standardisasi meliputi bimbingan teknis, *workshop*/seminar/sosialisasi.

04. Sinkronisasi Kerjasama Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan sinkronisasi kerjasama standardisasi.

05. Monitoring Evaluasi Kerjasama Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan monitoring evaluasi kerjasama standardisasi.

06. Jasa Layanan Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan jasa layanan standardisasi.

07. Pengembangan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kerjasama

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur kerjasama internasional maupun dalam negeri.

IS. SISTEM DAN LAYANAN INFORMASI STANDARDISASI

00. Kebijakan Mengenai Sistem dan Layanan Informasi Standardisasi

00.00 Kebijakan Mengenai Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan mengenai sistem komunikasi data dan jaringan informasi standardisasi.

00.01 Kebijakan Mengenai Dokumentasi dan Perpustakaan Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan mengenai dokumentasi dan perpustakaan standardisasi.

00.02 Kebijakan Mengenai Pendayagunaan Informasi Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan mengenai pendayagunaan informasi standardisasi.

## 01. Pengelolaan Sistem Komunikasi Data

### 01.00 Aplikasi Sistem Informasi Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan aplikasi sistem informasi standardisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk di dalamnya daftar aplikasi dan manajemen aplikasai sistem informasi.

### 01.01 Penanganan Keluhan Aplikasi Sistem Informasi Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penanganan keluhan terkait aplikasi sistem informasi standardisasi.

## 02. Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Standardisasi

### 02.00 Pengelolaan Server

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan server mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

### 02.01 Pengelolaan Surat Elektronik (*Email*)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan email mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

### 02.02 Pengelolaan Jaringan (kabel dan nirkabel)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan jaringan (kabel dan nirkabel) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk di dalamnya hak akses jaringan dan pemantauan kecepatan internet.

### 02.03 Penanganan Masalah Jaringan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan masalah jaringan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

### 02.04 Keamanan Informasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keamanan informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

02.05 Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sosialisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ *workshop*/ sosialisasi di bidang teknologi informasi termasuk di dalamnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

03. Pengelolaan Alih Media Standardisasi dan Penerbitan SNI

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih media dan penerbitan SNI serta Naskah yang berkaitan dengan kegiatan SNI Channel mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

04. Dokumentasi SNI

04.00 Dokumentasi SNI

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi SNI mulai dari akuisisi, pengolahan, penyimpanan dokumen SNI.

04.01 Pengelolaan Data SNI

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data SNI.

04.02 Layanan Dokumentasi Standar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan dokumentasi standar meliputi layanan standar untuk penggunaan internal BSN.

05. Perpustakaan

05.00 Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan meliputi analisis kebutuhan koleksi, seleksi, pembelian, sumbangan/hibah, pertukaran koleksi dan produk perpustakaan (koleksi deposit), penyiangan (*weeding*) koleksi dan cacah ulang (*stock opname*) koleksi termasuk di dalamnya pemeliharaan koleksi perpustakaan.

05.01 Pengolahan Bahan Pustaka

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan bahan pustaka meliputi inventarisasi bahan pustaka, klasifikasi dan tajuk subjek, katalogisasi, entri data, pengerakan (*shelving*), anotasi, indeks dan bibliografi (katalog referensi).

05.02 Jasa Perpustakaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jasa perpustakaan meliputi pendaftaran anggota, layanan sirkulasi, layanan baca di tempat, bimbingan pemakai, literasi informasi, data dan statistik pemanfaatan jasa perpustakaan.

05.03 Kerjasama Antar Perpustakaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama antar perpustakaan yang meliputi forum perpustakaan dan kegiatannya.

05.04 Jasa Layanan Standar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan penjualan dokumen standar termasuk di dalamnya statistik penjualan standar dan pengelolaan data pelanggan.

06. Pendayagunaan Informasi Standardisasi

06.00 Kemasan informasi standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemasan informasi standardisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk penyimpanannya.

06.01 Diseminasi informasi standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi informasi standardisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk di dalamnya pengelolaan data *stakeholder* (pelanggan).

06.02 Kerjasama Informasi Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama informasi standardisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- 06.03 Terjemahan Dokumen Bidang Standardisasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan terjemahan dokumen bidang standardisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- 06.04 Layanan Penelusuran Informasi Standardisasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan penelusuran informasi standardisasi termasuk di dalamnya statistik layanan dan pengelolaan data pelanggan.

## PD. PENDIDIKAN

00. Kebijakan Mengenai Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan mengenai pendidikan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
01. Layanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelenggaraan jasa pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
02. Sistem dan Evaluasi Pendidikan Standardisasi
- 02.00 Sistem dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi  
Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- 02.01 Sistem dan Evaluasi Pemasarakatan Standardisasi  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem pemasarakatan standardisasi dan sistem jaminan mutu.

03. Bina Profesi Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan kompetensi profesi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

PM. PEMASYARAKATAN

00. Kebijakan Mengenai Pemasarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan mengenai pemasarakatan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

01. Pemasarakatan Standardisasi

01.00 Promosi Standardisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan pengembangan promosi standardisasi dan sistem jaminan mutu.

01.01 Partisipasi Masyarakat

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan bimbingan partisipasi masyarakat dalam promosi standardisasi dan sistem jaminan mutu.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA